

## **Analisis Implementasi Hankamrata di Indonesia ditinjau dari Aspek Anggaran Pertahanan Negara**

**Karolus Evantino<sup>1</sup>, Sri Sundari<sup>2</sup>, Hikmat Zakky Almubaroq<sup>3</sup>, Leo Sianipar<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan,

<sup>4</sup>Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

*bungroggerindra08@gmail.com*<sup>1</sup>, *srisundari65@yahoo.co.id*<sup>2</sup>

*zakkyauri94@gmail.com*<sup>3</sup>, *peterleomedia@gmail.com*<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*Defense and security are the main elements of the sustainability of a sovereign state with a variety of strategies that will be applied in accordance with national and even international dynamics. In formulating defense and security policies, national vigilance becomes a reference for various threats that go back and forth. Indonesia, which adheres to the Universal People's Defense and Security System (SISHANKAMRATA), has developed short and long-term defense strategies with efforts to optimize defense resources both in terms of infrastructure and technological and management adjustments. One of the main elements in developing potential defense resources is the source of funds or budget. In allocating the defense budget, the main concern is the creation, maintenance and equipping of the armed forces. The purpose of writing this article focuses on the concept and implementation of the Universal People's Defense System (SISHANKAMRATA) in terms of state defense budget management. The research method used is a literature study. The results of the literature study show that it is important for the government to make defense force development plans through sufficient and balanced budget allocations to create reliable defense capabilities. The program must be implemented in a transparent and accountable manner so that the available budget can be utilized as efficiently as possible for a utilization of the importance of a concept of defending the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Defense, Sishankamrata, Defense Budget, Hankamrata.*

### **ABSTRAK**

Pertahanan dan keamanan adalah unsur utama keberlangsungan sebuah negara yang berdaulat dengan berbagai macam strategi yang akan diterapkan sesuai dengan dinamika nasional terlebih internasional. Dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan kewaspadaan nasional menjadi acuan akan berbagai ancaman yang hilir mudik. Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) telah menyusun strategi pertahanan jangka pendek maupun jangka panjang dengan upaya optimalisasi sumber daya pertahanan baik dari sisi infrastruktur maupun penyesuaian teknologi dan manajemen. Salah satu unsur utama dalam pengembangan potensi sumber daya pertahanan adalah sumber dana atau anggaran. Dalam mengalokasikan anggaran pertahanan perhatian utama adalah penciptaan, pemeliharaan dan melengkapi angkatan bersenjata. Tujuan dari penulisan artikel ini menitikberatkan pada konsep dan implementasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang ditinjau dari aspek pengelolaan anggaran pertahanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil

studi literatur menunjukkan bahwa pentingnya pemerintah membuat rencana-rencana pembangunan kekuatan pertahanan melalui alokasi anggaran yang cukup dan berimbang untuk menciptakan kemampuan pertahanan yang dapat diandalkan. Program tersebut harus diimplementasikan secara transparan dan akuntabel sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan seefisien mungkin untuk sebuah pemanfaatan akan pentingnya sebuah konsep mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata kunci :** *Pertahanan, Sishankamrata, Anggaran Pertahanan, Hankamrata.*

## PENDAHULUAN

Demi pengamanan dan kedaulatan sebuah negara, langkah antisipasi oleh pemerintah adalah potensi ancaman yang datang silih berganti sesuai dengan dinamika yang ada baik di lingkup regional, nasional maupun internasional. Pilihan strategi dan kebijakan pertahanan menjadi kunci pokok dalam pilihan untuk merumuskan berbagai program dan pengembangan potensi sumber daya pertahanan. Indonesia yang mengenal doktrin pertahanan HANKAMRATA (Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) dianggap efektif saat mengusir penjajah dan menjadi semangat kolektif untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Salah satu unsur utama dalam pengembangan potensi sumber daya pertahanan adalah sumber dana atau anggaran. Dalam sebuah pengelolaan negara, anggaran bukan saja menyokong sektor pertahanan tetapi juga sektor-sektor lainnya seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Karenanya dalam implementasinya perlu dilakukan optimalisasi atau prioritas-prioritas sesuai dengan kemampuan fiskal suatu negara, karena pertahanan merupakan gapura atau pintu utama sebuah negara yang saling terkait dengan beberapa sektor lainnya. Komitmen suatu negara untuk mengalokasikan anggaran pertahanan dimaksud agar dapat mengamankan dan meningkatkan keamanan negara dari ancaman militer dan nir militer, baik itu ancaman secara fisik ataupun psikologis di lingkup internal maupun eksternal.

Dalam mengalokasikan anggaran pertahanan perhatian utama adalah penciptaan, pemeliharaan dan melengkapi angkatan bersenjata. Hal ini berlaku untuk semua negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi negara beserta teritorialnya, dan keamanan bagi para warga negaranya. Anggaran pertahanan merupakan jantung dari upaya manajemen pertahanan dalam rangka melindungi sumber daya dan seluruh tumpah darah Indonesia yang selalu berkembang secara dinamis dengan berbagai ketidakpastian global dan kepentingan masing-masing negara. Oleh karena itu adagium "*Si Vis Pacem Parabelum*" menjadi tonggak dalam implementasinya dengan mempersiapkan seluruh langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang baik dari luar ataupun dari dalam.

Kementerian Pertahanan mengartikan anggaran pertahanan sebagai suatu rencana pekerjaan keuangan yang disusun secara sistematis, yang meliputi jumlah pengeluaran maksimal yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara dalam jangka waktu tertentu dan perkiraan pendapatan yang mungkin dapat

diterima dalam masa tersebut. Indonesia terus berupaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan pertahanan negara dengan rencana strategi dan pembelanjaan yang terukur dengan menyesuaikan anggaran negara. Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran negara di bidang pertahanan umumnya digunakan untuk pengembangan kekuatan militer. Masalah keterbatasan sumber daya, atau postur anggaran negara menjadi faktor utama dalam membangun pertahanan Indonesia. Modal utama yang sangat penting dalam pengembangan pertahanan adalah anggaran pertahanan (Anggoro, 2004).

Di tengah dinamika dan ancaman yang terus mendesak terhadap negara yang sedang berkembang baik berasal dalam tataran global, regional, maupun nasional membuat Indonesia harus mengadopsi berbagai teknologi terbaru bagi kepentingan militer yang ditujukan untuk mempertahankan diri dari ancaman militer maupun non militer, serta kepentingan nasional dari berbagai ancaman yang timbul dari berbagai aktor nasional maupun internasional.

Perkembangan global dan juga tantangan yang begitu kompleks, turut membawa isu dan potensi ancaman baik militer maupun non militer. Kewaspadaan terkait ancaman tersebut harus disikapi dengan langkah dan strategi terukur dalam mengantisipasi nya. Ancaman non militer saat ini begitu dominan guna menekan dan memberi pressure atau ancaman bagi negara lain untuk mewujudkan ambisi negara tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sinergitas seluruh unsur dalam membangun kekuatan menghadapi ancaman non militer harus dilakukan secara terencana dan juga terstruktur sesuai dengan doktrin pertahanan negara yang harus diimbangi dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang pertahanan. Peran strategis intelijen menjadi garda terdepan untuk melakukan cegah tangkal dan mendeteksi dini dari berbagai potensi ancaman non militer yang berpotensi dapat terjadi kapan saja.

Dari uraian diatas, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Hankamrata di Indonesia ditinjau dari aspek anggaran pertahanan negara.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau penelitankepustakaan. Syaodih (2009) menyatakan metode ini berkenaan dengan metodepengumpulan data pustaka, atau penelitian yangobyek penelitiannya digali melalui beragaminformasi kepustakaan (buku,ensiklopedi,jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).Pengumpulan data digali dari literatur yangterkait dengan apa yang dimaksudkan dalamrumusan masalah dan dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untukmenjawab permasalahan tersebut.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

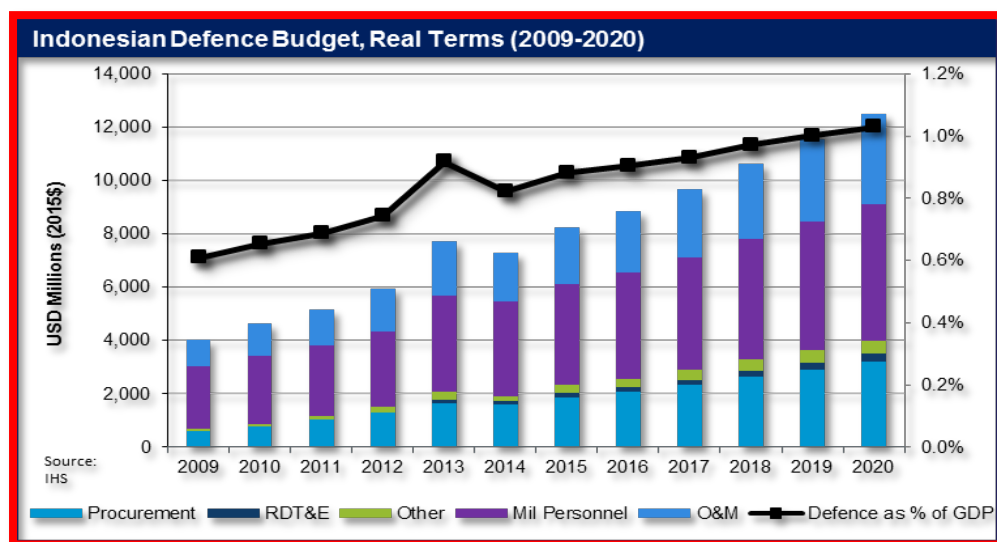
Gambaran Anggaran Pertahanan Indonesia :

Gambaran Anggaran Pertahanan Indonesia Muhaimin (2008) menjelaskan kegunaan anggaran pertahanan, bahwa anggaran belanja pertahanan adalah jumlah

uang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai angkatan bersenjata nasional, meliputi pasukan-pasukan pada angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, dan juga pasukan komando, pasukan cadangan, kelengkapan administrasi, serta komponen penunjang, termasuk di dalamnya kelompok milisi dan pelayanan pabean serta penjaga perbatasan yang dilatih dengan taktik dan perlengkapan militer oleh pemegang otoritas militer. Tentu tunjangan kesejahteraan prajurit tetap harus menjadi prioritas.

Secara teori, anggaran pertahanan meningkat. Namun demikian, rasio terhadap PDB ini sejak krisis tahun 2004 terus menurun, bahkan pada tahun 2008 berada di angka 0,79% dibandingkan PDB. Namun ada perbaikan, sejak tahun 2010 tarif anggaran sudah mulai dinaikkan.

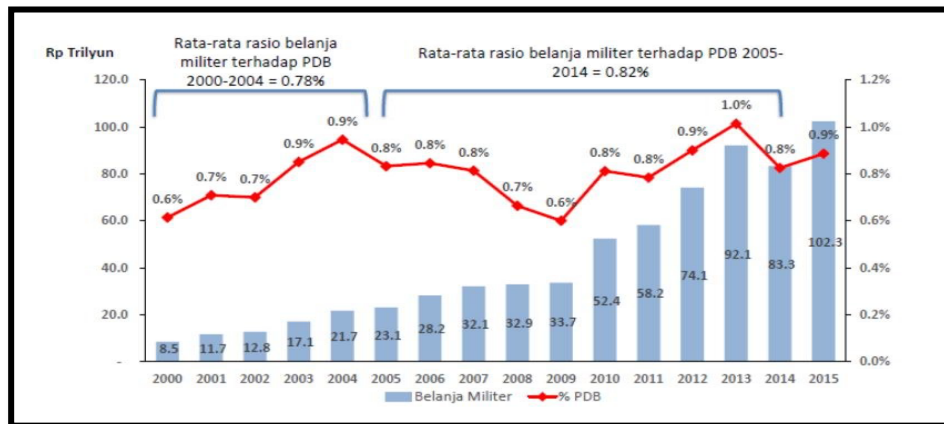
**Tabel 1. Rasio Belanja Kemiliteran Indonesia 2000-2016**



Sumber: Data Primer Kementerian Pertahanan RI, 23 Juli 2023

Kenaikan nilai nominal anggaran pertahanan terjadi pada anggaran rutin, sementara kenaikan anggaran pembangunan kekuatan pertahanan dalam jumlah yang sangat kecil sehingga kenaikan tersebut tidak memberikan efek signifikan terhadap pembangunan kekuatan. Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa belanja pegawai terlalu mendominasi, karena itu untuk tahun-tahun ke depan belanja modal yang berhubungan dengan alutista harus ditingkatkan.

Tabel 2. Belanja Pertahanan Indonesia dan Rasionya Tahun 2000-2015



Sumber: Data Primer Kementerian Pertahanan RI, 23 Juli 2023

Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut, sekitar 70% merupakan anggaran rutin (belanja barang dan belanja pegawai), sedangkan untuk pembangunan pertahanan hanya sekitar 30% (belanja modal). Penyediaan anggaran militer negara dinilai tidak cukup untuk pembelian alat utama senjata (alutsista). Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia, sebenarnya peningkatan denominasi anggaran pertahanan terjadi pada anggaran rutin, sedangkan peningkatan anggaran pembangunan kekuatan pertahanan sangat kecil sehingga peningkatan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian. dengan pengembangan kekuatan. Karena sebagian besar anggaran pertahanan merupakan anggaran rutin, maka anggaran pembangunan terkait langsung dengan pemeliharaan dan pengembangan alutsista yang tidak dapat direalisasikan pada masa pembangunan TNI.

Hal ini menunjukkan bahwa Program MEF (Minimum Essential Force) belum diterapkan secara optimal. Jumlah tersebut masih sangat kurang dalam konteks Indonesia belum memenuhi dan meningkatkan kualitas alutsistanya. Padahal pengadaan alutsista merupakan strategi yang dijalankan pemerintah, terutama karena industri strategis domestik belum dapat diandalkan untuk dijadikan industri substitusi bagi sumber alutsista Indonesia. Kecenderungan ini berarti pembiayaan pembelian alutsista harus berasal dari pasar senjata internasional dengan fasilitas kredit ekspor. Kementerian Pertahanan juga saat ini tampaknya sudah mengikuti arahan presiden untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam penyediaan dan produksi alutsista dalam negeri.

**Manajemen Anggaran Pertahanan:**

Kinerja pertahanan sangat tergantung pada besar kecilnya anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah. Selama ini penetapan total anggaran pertahanan masih didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Dalam UU TNI, Pasal 25 UU No 3 Tahun 2002 mengatur bahwa anggaran pertahanan bersumber dari APBN dan digunakan untuk membangun,

memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan Tentara Nasional Indonesia dan unsur-unsurnya. Pemerintah dalam rencana pembangunan jangka panjang 2005-2024 menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, diikuti dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, alokasi anggaran militer negara dinilai tidak cukup untuk pembelian alat utama persenjataan (alutsista).

Diukur dengan produk domestik bruto (PDB), rata-rata anggaran pertahanan selama beberapa dekade terakhir relatif stabil, selalu berada di bawah 1%. Tantangan manajemen pertahanan harus lebih kompleks. Tugas pengawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki aspek kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional, tetap menjadi prioritas utama penyelenggaraan pertahanan. Luas wilayah Indonesia kurang lebih 8 juta kilometer persegi dan ciri geografis sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan perairan seluas hampir 6 juta kilometer persegi memerlukan alokasi anggaran pertahanan yang sepadan dengan tingkat risiko yang dihadapi negara. Dengan alokasi anggaran pertahanan (di bawah 1% dari PDB) menjadi tantangan yang tidak mudah dalam manajemen penyelenggaraan pertahanan dalam mengawal NKRI.

Anggaran pertahanan yang sebenarnya digunakan untuk membiayai operasi, pemeliharaan alutsista, dan pengembangan kekuatan pertahanan masih di bawah kebutuhan minimum dibandingkan dengan tugas pertahanan yang cukup berat. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan pertahanan negara, baik dari segi personel dan alutsista (alat utama sistem senjata), maupun dukungan anggaran untuk pelaksanaan operasi tempur tersebut. Di sisi lain, kenyataan bahwa banyak alutsista TNI yang sudah tua namun tetap dipertahankan karena proses regenerasi berupa pembelian alutsista generasi baru untuk menggantikan alutsista lama, terjadi sangat lambat. Dengan anggaran yang minim, pemerintah tidak mampu sepenuhnya membangun senjata paling modern (*arms build-up*). Proses perawatan senjata ini meliputi perpanjangan usia alutsista, pembelian alutsista baru atau pemulihan alutsista terutama untuk keperluan operasional fisik, serta pembelian sarana komunikasi untuk meningkatkan pengendalian komando di markas dan satuan tempur TNI. Pembangunan alutsista selalu didahulukan dari pembangunan komponen pendukung, yang diupayakan terutama melalui “pendidikan warga negara, pelatihan dasar kemiliteran, dinas sebagai prajurit TNI baik sukarela maupun wajib, serta dinas profesional dan mengembangkan industri pertahanan”.

Pengalokasian anggaran pertahanan Indonesia juga menghadapi kendala struktural, pertahanan negara dialokasikan untuk tujuan berulang dan investasi atau pembangunan Anggaran terlihat minim karena mencakup anggaran operasional rutin dan gaji relatif kaku, sedangkan alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi. Namun demikian, terdapat peluang untuk dapat mempertahankan anggaran pemeliharaan dan pembangunan yaitu dengan merancang postur pertahanan agar anggaran rutin khususnya komponen gaji tidak terlalu besar karena kenaikannya bersifat permanen. Jika Anda mempertahankan posisi keuangan yang hati-hati, itu akan mengurangi peluang Anda

untuk mengembangkan dan mempertahankan pertahanan nasional Anda. Untuk itu diperlukan komitmen nasional untuk mengalokasikan sejumlah tertentu sumber daya nasional untuk pertahanan negara, serta perencanaan pertahanan yang obyektif dan rasional baik dari segi besaran maupun alokasinya sehingga militer dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Arsitektur Pertahanan Militer Dalam Postur Pertahanan Negara :

Dalam dokumen postur pertahanan negara dijelaskan bahwa Kementerian Pertahanan menyiapkan postur pertahanan negara yang disusun dalam keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan pagelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara. Postur pertahanan negara dikembangkan dari doktrin dan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan faktor geopolitik dan geostrategy Indonesia, serta karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Postur pertahanan militer dikembangkan dalam pola Tri-Matra Terpadu antara kekuatan matra darat, kekuatan matra laut, dan kekuatan matra udara.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kekuatan pertahanan militer mencakup aspek organisasi, peralatan utama sistem senjata dan pendukungnya, serta aspek pangkalan. Sedangkan kemampuan pertahanan militer mencakup lima kemampuan utama, yaitu kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan pemberdayaan wilayah dan dukungan.

Kekuatan pertahanan yang telah terbentuk secara profesional, kemudian dikembangkan dalam suatu gelar kekuatan pertahanan militer yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan strategi pertahanan negara guna menghadapi ancaman nyata dan menangkal ancaman potensial.

Apakah Postur Pertahanan Negara yang ada saat ini sudah menjawab tuntutan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia? Setidaknya ada tiga parameter yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu strategi pertahanan negara, postur pertahanan militer dan doktrin TNI. *Pertama*, strategi pertahanan negara yang menjadi acuan dalam penyusunan postur pertahanan militer yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan ancaman, sehingga secara substantif bersifat prosedural. Sedangkan pertimbangan konstelasi geografis kurang mendapat porsi yang memadai dalam rumusannya. *Kedua*, postur pertahanan militer lebih mengakomodasi aspek statis yang mencakup konsep kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan. Pertimbangan faktor geografi dalam penyusunan postur pertahanan militer belum terefleksi kan secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari gelar kekuatan yang belum proporsional ditinjau dari aspek kesatuan dihadapkan dengan kondisi geografi Indonesia. *Ketiga*, konsep Tri-matra Terpadu dalam doktrin TNI "*Tri Dharma Eka Karma*" lebih memberikan gambaran tentang penggabungan satuan-satuan ketiga matra dalam satu komando tugas gabungan, yang komposisinya disesuaikan dengan karakteristik ancaman dan jenis operasi yang akan dilaksanakan.

Dari ketiga parameter tersebut, kita belum mendapatkan gambaran tentang arsitektur pertahanan militer yang bisa mendukung terwujudnya Poros Maritim

Dunia. Secara normatif, arsitektur pertahanan militer seharusnya menjadi bagian integral yang dideskripsikan secara jelas dalam dokumen postur pertahanan negara.

Arsitektur pertahanan militer dapat didefinisikan sebagai struktur dinamik yang menggambarkan hubungan diantara unsur-unsur matra yang ada dalam suatu sistem pertahanan militer. Jadi, arsitektur pertahanan militer adalah aspek dinamis dari postur pertahanan militer, yang merupakan resultan dari perpaduan antara aspek kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan pertahanan militer. Arsitektur pertahanan militer itulah yang nantinya menjadi kerangka kerja bagi perumusan konsep Tri-matra Terpadu. Secara sederhana, arsitektur pertahanan militer dapat digambarkan sebagai perpaduan dinamis antara fungsi-fungsi peperangan yang ada dalam masing-masing matra yang dipadukan sehingga menghasilkan satu kekuatan pertahanan militer yang solid untuk menghadapi ancaman. Yang dimaksud dengan fungsi peperangan disini adalah pengelompokan kegiatan dan sistem yang memiliki kesamaan, yang digunakan oleh seorang Panglima untuk melakukan segala upaya dalam rangka mencapai tujuan peperangan. Fungsi-fungsi tersebut setidaknya mencakup (1) fungsi sensor, (2) fungsi komando dan pengendalian, (3) fungsi pemukul, (4) fungsi mobilitas, (5) fungsi proyeksi kekuatan, dan (6) fungsi dukungan.

Fungsi sensor mencakup kegiatan pengumpulan informasi/data, pengolahan informasi/data menjadi intelijen, dan distribusi intelijen kepada unsur-unsur lain yang ada dalam mandala operasi. Dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia, maka fungsi sensor pertahanan militer merupakan pepaduan dari sistem sensor TNI AU, TNI AL, TNI AD dan sistem sensor sipil yang telah dimobilisasi menurut perundangan-undangan yang berlaku. Fungsi sensor pertahanan militer disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat taktis, operasional sampai dengan tingkat strategis. Fungsi sensor yang handal harus memadukan sensor teknis (radar, satelit) dan sensor manusia secara proporsional.

Fungsi sensor dapat diselenggarakan dengan optimal apabila didukung dengan sistem sensor yang handal, yang menggabungkan kemampuan sistem penginderaan jarak jauh yang didukung dengan teknologi informatika dan komputer serta sistem komunikasi yang aman dan terpercaya. Untuk mewujudkan arsitektur pertahanan militer yang mampu menjawab tuntutan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pembangunan kemampuan sistem sensor pertahanan militer harus menjadi prioritas, karena sistem sensor merupakan mata dan telinga dari sistem pertahanan militer.

Tanpa sistem sensor yang baik, bangunan postur pertahanan militer tidak mampu mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman terhadap kedaulatan negara. Selama ini, pengembangan kemampuan sensor pertahanan militer berorientasi pada peningkatan kemampuan sensor sistem pertahanan udara nasional. Pepaduan kemampuan sensor antar matra dilakukan pada tataran operasional yang diatur dengan prosedur operasional oleh Komando Pertahanan Udara Nasional. Hal ini kurang menjawab kebutuhan informasi satuan-satuan matra lain dalam operasi gabungan yang bersifat Tri-matra Terpadu. Kedepan, pengembangan sistem sensor harus dilakukan secara terpadu sejak perencanaan sampai pada tahap pegelarangannya,

sehingga dapat lebih menjamin keterpaduan antar matra dalam pengoperasiannya. Untuk memperkuat sistem sensor, maka sistem penginderaan jarak jauh dengan menggunakan satelit nasional menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Penggunaan satelit nasional akan memperluas cakupan pengumpulan informasi tentang kondisi geografis mandala operasi dengan tingkat kerahasiaan yang relatif tinggi.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai elemen dinamis postur pertahanan militer, arsitektur pertahanan militer harus disusun dalam konteks penyusunan postur pertahanan militer. Dalam kaitan ini, arsitektur pertahanan militer dapat dipandang sebagai template bagi elemen-elemen statis postur pertahanan militer yang meliputi kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan. Agar bisa menjadi template bagi elemen-elemen statis postur pertahanan militer, penyusunan arsitektur pertahanan militer harus mempertimbangkan hasil analisa lingkungan strategis, khususnya yang berkaitan dengan dinamika kondisi geografis nasional. Secara substantif, arsitektur pertahanan militer berada pada ranah strategi pertahanan militer nasional dan berperan sebagai jembatan bagi penyusunan rencana kampanye militer. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan bertanggung jawab menyusun arsitektur pertahanan militer dengan melibatkan Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan.

Apabila arsitektur pertahanan militer telah tersusun dan berfungsi optimal, maka tugas berikutnya adalah melakukan kaji ulang secara periodik agar selalu mengikuti perkembangan lingkungan strategis dan perubahan kondisi geografi nasional. Arsitektur pertahanan militer tidak hanya berperan dalam menguatkan postur pertahanan militer untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, tetapi yang lebih krusial lagi adalah untuk meningkatkan daya gentar (*deterrence effect*) postur pertahanan militer terhadap pihak luar yang akan mengganggu kedaulatan negara.

Menghadapi kondisi geografis negara kepulauan, maka arsitektur militer pertahanan harus dipersiapkan sejak dini yang merupakan salah satu prasyarat keberhasilan sistem pertahanan negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara poros laut dunia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfajri, et. al. (2019). "Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia". *Jurnal Global Strategis*. Volume 13, No 1, hh 109.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paraktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia, (2015).
- Chrisnandi, Yuddy. (2007). "The Political Dilemma of Defence Budgeting in Indonesia". UNISCI Discussion Papers, No.15.

Dewan Pertimbangan Presiden RI. (2017). "Memperkuat Pertahanan Negara untuk Menghadapi Ancaman Nonmiliter Dalam Rangka Memperkokoh NKRI".  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/rasio-belanja-militer-terhadap-pdb-indonesia-terendah-di-asia-tenggara>  
<https://dataindonesia.id/varia/detail/rasio-belanja-militer-ri-terendah-di-asia-tenggara-pada-2021>  
<https://wantimpres.go.id/id/memperkuat-pertahanan-negara-untuk-menghadapi-ancaman-nonmiliter-dalam-rangka-memperkokoh-nkri/>., diakses 17 Desember 2021.